



Analisa Perilaku Sosial Masyarakat Dalam Memanfaatkan Taman Kota Sebagai Ruang Publik (Studi Kasus Pemanfaatan Taman Kota Dealova Pangkalpinang)

¹Muhammad Alan Pratama, ²Aimie Sulaiman, ³Budi Darmawan

^{1,2,3} Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung
e-mail: alanprtm09@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Juli 28, 2026
Revised Agustus 01, 2026
Accepted Agustus 12, 2026

Keywords:

Social Behavior, Vendors, Public Space, City Park, Habermas, Dealova City Park, Pangkalpinang

ABSTRACT

This study examines the social behavior of vendors in utilizing Dealova City Park in Pangkalpinang as a public space. The city park functions not only as a recreational area but has also developed into an informal economic space and a site of social interaction for vendors. This study aims to analyze the forms and factors influencing vendors' social behavior, as well as the process through which such behavior is formed from the perspective of Jürgen Habermas's concept of the public sphere. This study employs a qualitative method with a descriptive approach through observation, interviews, and documentation. The findings show that vendors' social behavior is manifested through interaction, communication, cooperation, and deliberation with fellow vendors, customers, park managers, and the government. These interactions have developed through the establishment of a vendors' forum as a platform for discussing common issues, such as cleanliness, facilities, stall arrangements, and contributions. The forum reflects Habermas's concept of communicative action through the process of expressing opinions and deliberating to reach agreements. However, the vendors' communication space is not fully autonomous, as it remains subject to government authority in the management of the park. Thus, Dealova City Park has developed from a physical space into a socio-communicative space with economic, social, and communicative dimensions, although the public sphere formed remains partial or semi-autonomous.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received Juli 28, 2026
Revised Agustus 01, 2026
Accepted Agustus 12, 2026

Keywords:

Perilaku Sosial, Pedagang, Ruang Publik, Taman Kota, Habermas, Taman Dealova Pangkalpinang

ABSTRACT

Penelitian ini membahas perilaku sosial pedagang dalam memanfaatkan Taman Kota Dealova Pangkalpinang sebagai ruang publik. Taman kota tidak hanya berfungsi sebagai ruang rekreasi, tetapi juga berkembang menjadi ruang ekonomi informal dan ruang interaksi sosial bagi pedagang. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk dan faktor yang memengaruhi perilaku sosial pedagang serta proses terbentuknya perilaku tersebut dalam perspektif ruang publik Jürgen Habermas. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku sosial pedagang diwujudkan melalui interaksi, komunikasi, kerja sama, dan musyawarah dengan sesama pedagang, pelanggan, pengelola taman, dan pemerintah. Interaksi tersebut berkembang melalui terbentuknya forum pedagang sebagai wadah untuk membahas persoalan bersama, seperti kebersihan, fasilitas, penataan lapak, dan iuran. Forum tersebut mencerminkan tindakan komunikatif melalui proses penyampaian



pendapat dan musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Namun, ruang komunikasi pedagang belum sepenuhnya otonom karena masih berada dalam kewenangan pemerintah dalam pengelolaan taman. Dengan demikian, Taman Kota Dealova berkembang dari ruang fisik menjadi ruang sosial-komunikatif yang memiliki dimensi ekonomi, sosial, dan komunikatif, meskipun karakter ruang publik yang terbentuk masih bersifat parsial atau semi-otonom.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Muhammad Alan Pratama
Universitas Bangka Belitung
Email: alanprtm09@gmail.com

PENDAHULUAN

Masyarakat merupakan suatu kumpulan yang selalu berubah karena proses masyarakat, kemudian masyarakat terbentuk karena interaksi yang terus menerus antar individu, dalam keberlangsungan nya pun masyarakat ada proses pengaruh dan mempengaruhi antara individu dan masyarakat. Awal dari masyarakat dapat dikatakan berasal dari hubungan antar individu, kemudian kelompok yang lebih besar lagi menjadi suatu kelompok besar yang disebut dengan masyarakat (Khairuddin, 2008: 110). Sedangkan Soekanto, (2006: 16) mendefinisikan bahwa masyarakat merupakan individu-individu yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat dalam kesamaan.

Berdasarkan pengertian yang disampaikan bahwa masyarakat merupakan kelompok yang berasal dari individu yang dimana kemudian terjadi interaksi satu dengan lain secara terus menerus dan berkembang semakin besar dan saling mempengaruhi satu sama lain yang menimbulkan perubahan sosial di lingkungan masyarakat tersebut karena memiliki persamaan budaya, wilayah bahkan tradisi. Struktur sosial masyarakat tentu memiliki subkomunitas yang diklasifikasikan secara khusus sebagai pembeda. Klasifikasi yang biasa nya ada di dalam masyarakat pada umum nya adalah klasifikasi pendidikan, bahwa dalam masyarakat ketika individu memiliki pendidikan tinggi akan lebih dianggap dibandingkan dengan yang tidak berpendidikan walaupun usia muda atau tua.

Perilaku sosial merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang mencerminkan bagaimana individu berinteraksi, berkomunikasi, serta membangun hubungan dalam suatu lingkungan sosial. Dalam konteks masyarakat perkotaan, perilaku sosial tidak hanya terbentuk melalui hubungan interpersonal, tetapi juga melalui interaksi yang berlangsung di ruang-ruang publik. Ruang publik menjadi arena yang memungkinkan terjadinya pertukaran gagasan, pembentukan relasi sosial, serta ekspresi identitas individu dan kelompok. Oleh karena itu, keberadaan ruang publik memiliki peran strategis dalam membentuk dinamika sosial masyarakat urban.

Perkembangan kota yang semakin pesat seringkali berdampak pada berkurangnya ruang interaksi sosial yang terbuka dan inklusif. Modernisasi dan urbanisasi mendorong masyarakat untuk lebih banyak beraktivitas dalam ruang privat maupun ruang komersial seperti pusat perbelanjaan dan kafe, yang secara tidak langsung membatasi akses kelompok tertentu. Dalam situasi tersebut, taman kota sebagai bagian dari ruang terbuka hijau memiliki fungsi yang tidak hanya ekologis, tetapi juga sosial. Taman kota menjadi salah satu ruang publik yang relatif



mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial, ekonomi, maupun latar belakang budaya.

Secara teoretis, konsep ruang publik banyak dibahas oleh Jürgen Habermas melalui gagasannya tentang public sphere dalam karya *The Structural Transformation of the Public Sphere*. Habermas menjelaskan bahwa ruang publik merupakan arena sosial tempat warga negara dapat berdiskusi secara rasional dan setara mengenai persoalan bersama. Dalam ruang publik yang ideal, komunikasi berlangsung tanpa dominasi dan memungkinkan terbentuknya konsensus sosial yang demokratis. Dengan demikian, perilaku sosial masyarakat dalam ruang publik dapat dianalisis berdasarkan sejauh mana interaksi yang terjadi mencerminkan rasionalitas komunikatif, yakni dialog terbuka yang berorientasi pada pemahaman bersama.

Perkembangan suatu kota tidak hanya diukur dari pertumbuhan fisik bangunan dan infrastrukturnya, tetapi juga dari ketersediaan ruang publik yang dapat diakses secara terbuka oleh seluruh lapisan masyarakat. Ruang publik memiliki peran penting sebagai wadah interaksi sosial, tempat berkumpul, berekreasi, serta sarana untuk membangun rasa kebersamaan antarwarga kota. Seiring dengan meningkatnya kepadatan penduduk dan alih fungsi lahan menjadi kawasan permukiman maupun komersial, keberadaan ruang terbuka publik seperti taman kota menjadi semakin penting untuk menjaga keseimbangan antara aspek ekologis, sosial, dan estetika perkotaan.

Taman kota merupakan salah satu bentuk ruang publik yang paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat perkotaan karena sifatnya yang terbuka, mudah diakses, dan tidak dipungut biaya. Selain berfungsi sebagai paru-paru kota yang menyediakan ruang terbuka hijau, taman kota juga berfungsi sebagai tempat masyarakat melakukan berbagai aktivitas sosial, mulai dari berolahraga, bersantai, berkumpul bersama keluarga dan teman, hingga melakukan aktivitas ekonomi informal seperti berdagang. Dalam konteks ini, taman kota tidak lagi sekadar dipahami sebagai elemen fisik tata ruang kota, melainkan juga sebagai arena sosial tempat berlangsungnya berbagai bentuk interaksi dan perilaku masyarakat.

Kota Pangkalpinang sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki salah satu ruang publik yang cukup populer di kalangan masyarakat, yaitu Taman Dealova. Taman ini terletak di Kecamatan Gerunggang dan dikenal luas oleh warga setempat maupun wisatawan karena keunikan kontur perbukitannya, ketersediaan area bermain anak, jalur jogging, gazebo, arena skateboard, wall climbing, serta deretan pedagang kuliner yang semakin ramai pada sore hingga malam hari. Taman Dealova secara rutin dikunjungi oleh berbagai kalangan usia, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa, hingga lanjut usia, baik untuk berolahraga, bersantai, maupun sekadar menikmati suasana kota pada waktu senggang. Pada momen-momen tertentu, taman ini bahkan mampu menampung kerumunan pengunjung dalam jumlah besar, yang menunjukkan tingginya intensitas pemanfaatan ruang tersebut oleh masyarakat.

Tingginya intensitas kunjungan masyarakat ke Taman Dealova memunculkan beragam bentuk perilaku sosial yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Di satu sisi, taman ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk membangun interaksi sosial yang positif, seperti berkumpul bersama keluarga, bersosialisasi dengan sesama pengunjung, maupun melakukan aktivitas ekonomi kreatif melalui usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang turut menghidupkan perekonomian sekitar. Di sisi lain, keberagaman aktivitas dan karakter pengunjung yang datang dari berbagai latar belakang sosial juga berpotensi memunculkan dinamika tersendiri dalam pemanfaatan ruang, seperti pembagian zona aktivitas, kesepakatan tidak tertulis mengenai penggunaan fasilitas bersama, hingga pola perilaku yang mencerminkan bagaimana masyarakat secara kolektif membentuk dan memaknai ruang publik tersebut.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan taman kota bukan sekadar persoalan fisik dan tata ruang, melainkan juga persoalan sosial yang berkaitan dengan bagaimana masyarakat berperilaku, berinteraksi, dan pada akhirnya membentuk makna serta



fungsi ruang publik itu sendiri. Perilaku sosial masyarakat dalam memanfaatkan taman kota dapat dilihat sebagai cerminan dari nilai, norma, dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, sekaligus sebagai proses sosial yang secara aktif turut membentuk karakter ruang publik dari waktu ke waktu. Dengan demikian, kajian mengenai perilaku sosial masyarakat di Taman Dealova menjadi penting untuk memahami relasi timbal balik antara masyarakat dan ruang publik perkotaan yang mereka gunakan sehari-hari.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Perilaku Sosial Masyarakat dalam Memanfaatkan Taman Kota sebagai Ruang Publik (Studi Kasus Pemanfaatan Taman Kota Dealova Pangkalpinang)” guna menganalisis lebih mendalam bentuk-bentuk perilaku sosial masyarakat serta bagaimana perilaku tersebut turut membentuk ruang publik di Taman Dealova Pangkalpinang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Penelitian kualitatif lebih berkenaan dengan proses yang penuh dengan nilai (*value*), tidak memiliki ukuran yang telah dipatok sejak awal (Fadli, 2021). Menurut Bailey dalam (Mukhtar, 2013), analisis deskriptif mendiskusikan berbagai kasus yang sifatnya umum tentang berbagai fenomena sosial yang ditemukan. Kemudian, penelitian ini dilakukan di Taman Dealova Kota Pangkalpinang. Hal ini dikarenakan Taman Dealova Kota Pangkalpinang merupakan tempat yang sangat digemari oleh masyarakat dalam kesehariannya, seperti bersantai ataupun berfoto ria.

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder didapatkan dari artikel jurnal, buku, dan penelitian-penelitian terdahulu. Subjek dan teknik penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi. Terakhir, untuk teknik analisis data menggunakan tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan Kesimpulan serta verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk perilaku sosial masyarakat dalam memanfaatkan ruang publik perkotaan di Taman Kota Dealova Pangkalpinang

Pada penelitian ini, yang dimaksud dengan pengguna ruang publik adalah masyarakat yang secara langsung memanfaatkan keberadaan Taman Kota Dealova untuk berbagai kepentingan mereka. Sebagai ruang publik, taman ini memberikan akses terbuka bagi seluruh kalangan masyarakat tanpa adanya batasan usia, status sosial, maupun latar belakang ekonomi. Keberagaman latar belakang pengunjung menjadikan taman sebagai ruang yang inklusif, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk hadir dan beraktivitas. Hal ini sesuai dengan karakter ruang publik yang ideal, yaitu dapat diakses secara luas oleh masyarakat umum dan mencerminkan keberagaman sosial dalam suatu kota.

Pengguna Taman Dealova dapat dibedakan ke dalam beberapa kelompok aktivitas. Pertama, masyarakat yang datang secara individu maupun berkelompok untuk melakukan kegiatan rekreasi, seperti bersantai, berfoto, berdialog, atau berolahraga. Kelompok ini umumnya datang untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis, baik sebagai sarana hiburan maupun untuk menjaga kebugaran tubuh. Kedua, terdapat kelompok yang menggunakan taman sebagai arena kegiatan sosial, seperti berkumpulnya komunitas, organisasi, maupun kelompok remaja yang menjadikan taman sebagai tempat bertukar ide, latihan, atau sekadar mempererat hubungan sosial. Aktivitas-aktivitas tersebut memperlihatkan bahwa taman bukan sekadar



tempat melepas penat, melainkan juga menjadi medium yang memperkuat interaksi sosial antarwarga.

Selain itu, Taman Dealova juga dimanfaatkan oleh pelaku ekonomi, terutama pedagang dan pelaku UMKM yang membuka usaha di sekitar area taman. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa taman memiliki fungsi tambahan sebagai ruang ekonomi informal, di mana terjadi interaksi langsung antara pedagang dengan pengunjung. Aktivitas jual beli yang berlangsung tidak hanya memberikan keuntungan finansial bagi pedagang, tetapi juga menambah daya tarik taman karena pengunjung dapat memenuhi kebutuhan konsumsi selama berada di lokasi. Dengan demikian, pengguna Taman Dealova tidak hanya terbatas pada masyarakat yang beraktivitas rekreatif, tetapi juga mencakup pelaku ekonomi yang turut menjadikan taman sebagai bagian dari ruang kehidupannya.

Bentuk-bentuk perilaku sosial masyarakat dalam memanfaatkan ruang publik perkotaan di Taman Kota Dealova Pangkalpinang mencerminkan keragaman aktivitas sosial yang tumbuh secara alami di tengah lingkungan perkotaan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara lapangan, masyarakat menggunakan Taman Dealova tidak hanya sebagai tempat rekreasi, tetapi juga sebagai ruang sosial untuk membangun interaksi, solidaritas, serta aktivitas ekonomi kecil. Pada pagi dan sore hari, taman ini ramai oleh warga yang berolahraga, seperti berjalan santai, berlari, atau bersepeda. Aktivitas ini menjadi bentuk perilaku sosial yang menunjukkan kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya kesehatan dan gaya hidup aktif di ruang terbuka. Sementara pada waktu senggang dan akhir pekan, taman dimanfaatkan sebagai tempat berkumpul keluarga, bermain anak-anak, serta ajang bersosialisasi antarwarga. Dalam konteks ini, taman berfungsi sebagai ruang rekreatif dan sosial yang mempertemukan berbagai lapisan masyarakat tanpa sekat status sosial, ekonomi, maupun usia.

Merujuk pada teori tindakan sosial Jürgen Habermas, tindakan komunikatif adalah tindakan yang berorientasi pada tercapainya kesepahaman bersama melalui interaksi bahasa dan argumentasi terbuka antarindividu. Sebaliknya, tindakan instrumental adalah tindakan yang berorientasi pada pencapaian tujuan pribadi secara efisien (rasionalitas tujuan-sarana), tanpa keharusan menghasilkan kesepahaman dengan pihak lain. Pembagian berikut mengelompokkan data wawancara dan observasi ke dalam kedua kategori tersebut.

1. Tindakan Komunikatif

(interaksi yang berorientasi pada kesepahaman bersama melalui dialog dan pertukaran gagasan)

Wawancara Aldi (pengunjung — aktivitas berdialog):

"tujuan saya mengunjungi taman dealova adalah kondisi taman dealova yang ramai didatangi oleh masyarakat yang dimana hal tersebut saya manfaatkan untuk berdialog dengan beberapa orang baik itu orang tua, usia sebaya maupun remaja... karena latar belakang saya yang suka menulis hal itu yang membuat saya suka memanfaatkan taman dealova untuk berdialog mencari inspirasi untuk tulisan saya pribadi"

→ Aldi memanfaatkan taman sebagai ruang berdialog lintas usia untuk mencapai pemahaman baru dan inspirasi — proses ini berlangsung melalui pertukaran gagasan dengan pihak lain, bukan sekadar mengejar tujuan pribadi tanpa interaksi.

Wawancara Aldi (bagian inklusivitas — ngobrol dengan orang random):

"Biasanya saya ditaman dealova hanya sekedar bersantai bahkan biasanya ngobrol dengan orang random yang juga bersantai disini juga dan saya juga sering memperhatikan sekeliling..."

→ Obrolan spontan dengan pengunjung lain menunjukkan komunikasi yang terbuka dan tidak terstruktur — ciri khas ruang publik sebagai arena interaksi bebas dalam pengertian Habermas.

Wawancara Aldi (rasionalitas komunikatif — dialog spontan menghasilkan pemahaman baru):



"Sesering itu saya berinteraksi dengan orang lain sehingga saya sering mendapatkan pengetahuan baru yang sebelumnya saya tidak tau semua berjalan begitu saja obrolan mengalir aja tanpa ada topik yang saya tentukan sebelumnya dari hal itu lah muncul ide-ide baru saya untuk kedepannya"

→ Ini adalah bentuk paling eksplisit dari tindakan komunikatif dalam data: interaksi tidak diarahkan untuk mencapai kepentingan pribadi tertentu, melainkan mengalir secara terbuka dan menghasilkan pemahaman/gagasan baru — sejalan dengan konsep rasionalitas komunikatif Habermas yang menekankan proses, bukan hasil, dari pertukaran argumentasi.

Aktivitas kolektif spontan (senam bersama, pertemuan komunitas, kegiatan keagamaan):

"muncul pula perilaku sosial yang bersifat kolektif seperti kegiatan senam bersama, pertemuan komunitas, hingga aktivitas keagamaan skala kecil yang dilakukan secara spontan oleh warga."

→ Kegiatan-kegiatan ini melibatkan interaksi kolektif yang mempererat hubungan sosial antarwarga, sehingga lebih dekat pada tindakan komunikatif — meski data belum menjelaskan secara rinci muatan dialog/argumentasi di dalamnya.

Wawancara petugas taman (pola malam hari — kelompok remaja berkumpul):

"...lain dengan malam hari cenderung remaja yang berkelompok ataupun berpasangan dengan tujuan mereka masing-masing."

→ Jika tujuan berkumpulnya remaja ini adalah untuk bertukar cerita/mempererat relasi sosial, aktivitas ini termasuk tindakan komunikatif. Namun data belum cukup rinci untuk memastikan hal tersebut — perlu wawancara tambahan langsung kepada kelompok remaja yang dimaksud.

2. Tindakan Instrumental

(tindakan yang berorientasi pada pencapaian tujuan pribadi secara efisien — kesehatan, relaksasi, kebutuhan personal — tanpa keharusan mencapai kesepakatan dengan pihak lain)

Aktivitas olahraga (pagi & sore hari):

Taman ramai oleh warga yang berjalan santai, berlari, atau bersepeda pada pagi dan sore hari. Aktivitas ini berorientasi pada pencapaian tujuan kebugaran fisik pribadi, sehingga termasuk tindakan instrumental — meskipun dilakukan di ruang publik, tujuannya bersifat individual (kesehatan), bukan mencapai kesepakatan dengan orang lain.

Aktivitas keluarga (waktu senggang & akhir pekan):

Taman dimanfaatkan sebagai tempat berkumpul keluarga dan bermain anak-anak. Aktivitas ini berorientasi pada pemenuhan kebutuhan rekreasi dan hiburan keluarga sebagai tujuan praktis, sehingga lebih tepat dikategorikan sebagai tindakan instrumental, meskipun tetap berlangsung dalam konteks sosial.

B. Proses terjadinya transisi stigma masyarakat dari negatif ke positif hingga menjadi ambigu dalam memaknai Taman Kota Dealova Pangkalpinang sebagai ruang publik

Pelaku usaha yang menjadi informan dalam penelitian ini merupakan salah satu pedagang yang secara konsisten berjualan di sekitar taman tersebut. Usaha yang dijalankannya berawal dari peristiwa yang tidak direncanakan, sebagaimana diakui informan bahwa ia menemukan peluang usaha ketika sedang mengajak anaknya bermain di taman. Fakta ini menunjukkan bahwa kehadiran UMKM di ruang publik semacam ini seringkali bersifat organik dan tidak terprogram secara institusional, melainkan lahir dari observasi warga terhadap potensi ekonomi yang muncul dari keramaian pengunjung taman sehari-hari.

Dalam menjalankan usahanya, informan berinteraksi dengan berbagai pihak: pelanggan sebagai mitra transaksi utama, sesama pedagang sebagai jejaring sosial-ekonomi terdekat, serta sesekali dengan pihak pemerintah dan petugas penjaga taman terkait pengelolaan ruang



berjualan. Struktur interaksi berlapis ini menjadi titik tolak penting untuk memahami bagaimana ruang publik terbentuk secara bertahap: dari relasi individual menuju relasi kolektif yang lebih terorganisasi melalui forum atau grup pedagang.

Berdasarkan hasil wawancara, bentuk interaksi sosial informan tidak bersifat tunggal, melainkan mencakup beberapa lapisan hubungan. Ia menyebutkan bahwa pihak yang rutin diajak bicara adalah "pelanggan dan teman pedagang saya, sesekali dengan pihak pemerintahan ketika saya merasa ada beberapa hal yang harus saya bicarakan, karena disini juga ada penjaga taman bertugas." Pernyataan ini memperlihatkan bahwa interaksi informan tidak terbatas pada relasi ekonomi (jual-beli) semata, tetapi meluas pada relasi sosial dengan sesama pedagang serta relasi administratif-fungsional dengan aparat pengelola ruang publik.

Interaksi dengan sesama pedagang tampaknya menjadi lapisan yang paling intens, sebab dari relasi inilah kemudian terbentuk forum kolektif yang lebih terstruktur. Sementara itu, interaksi dengan pihak pemerintah bersifat situasional — hanya terjadi ketika ada hal tertentu yang perlu dikomunikasikan, bukan merupakan komunikasi rutin harian. Pola ini menunjukkan adanya jarak struktural antara pelaku usaha dan otoritas pengelola ruang, di mana komunikasi baru terjadi pada momen-momen tertentu, bukan sebagai bagian dari mekanisme partisipasi yang melembaga secara permanen.

Proses transformasi kepentingan individual menjadi aspirasi kolektif dalam penelitian ini terlihat dari keberadaan forum atau grup pedagang. Informan menjelaskan bahwa "ada grup pedagang isinya ya para pedagang biasanya membahas persoalan sampah dan juga fasilitas untuk berjualan." Grup ini berfungsi sebagai ruang informal tempat keluhan-keluhan individual, seperti masalah kebersihan dan keterbatasan fasilitas berjualan, diangkat dan dibicarakan secara bersama, sehingga tidak lagi menjadi persoalan pribadi tiap pedagang melainkan menjadi agenda kolektif.

Terkait siapa saja yang dapat berpartisipasi dalam forum tersebut, informan menegaskan bahwa "semua boleh berbicara." Pernyataan ini menjadi indikator awal yang penting untuk menilai derajat keterbukaan (openness) forum sebagai ruang publik, sebab tidak ditemukan adanya pembatasan partisipasi berdasarkan skala usaha, lama berjualan, atau status sosial tertentu.

Selanjutnya, terkait proses pengambilan keputusan atas persoalan yang menyangkut banyak pelaku usaha, seperti penataan lapak atau penentuan iuran, informan menyatakan bahwa keputusan tersebut "pasti nya hasil dari musyawarah bersama dan biasanya dari pemerintah hanya membatasi dimana batas UMKM bisa berjualan karena kan tujuan taman ini bukan hanya untuk bersantai." Pernyataan ini memuat dua informasi penting sekaligus: pertama, bahwa keputusan internal pedagang dihasilkan melalui musyawarah; kedua, bahwa terdapat batas eksternal berupa kebijakan pemerintah yang menetapkan wilayah berjualan, sebagai konsekuensi dari fungsi ganda taman sebagai ruang rekreasi sekaligus ruang ekonomi informal.

Merujuk pada data di atas, forum pedagang yang terbentuk menunjukkan sejumlah karakteristik yang sejalan dengan kriteria ruang publik ideal Habermas, khususnya pada aspek keterbukaan akses dan orientasi pada musyawarah. Namun demikian, ditemukan pula batasan struktural berupa kewenangan pemerintah dalam menentukan wilayah berjualan, yang mengindikasikan bahwa forum ini belum sepenuhnya otonom dari kekuasaan eksternal. Uraian lebih rinci mengenai pemetaan tiap indikator disajikan pada sub-bab analisis berikut.

Konsep ruang publik (*Öffentlichkeit*) yang dikemukakan oleh Jürgen Habermas merujuk pada suatu arena sosial tempat warga negara dapat berkumpul secara bebas, mengemukakan pendapat, dan melalui proses argumentasi rasional membentuk opini publik yang otonom dari intervensi negara maupun kepentingan pasar. Ruang publik ideal, menurut Habermas, ditandai oleh lima prinsip utama, yaitu aksesibilitas universal, kesetaraan berbicara, rasionalitas komunikatif, otonomi dari kekuasaan, dan orientasi pada konsensus. Kelima prinsip inilah yang



digunakan sebagai indikator analisis dalam penelitian ini untuk menilai sejauh mana forum pedagang UMKM di kawasan taman merepresentasikan ruang publik ideal tersebut.

Prinsip aksesibilitas universal menuntut bahwa ruang publik harus terbuka bagi siapa pun tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang tertentu. Dalam kasus ini, pernyataan informan bahwa "semua boleh berbicara" menjadi indikasi kuat terpenuhinya prinsip tersebut, setidaknya pada tataran normatif. Tidak ditemukan mekanisme seleksi keanggotaan, iuran keanggotaan yang membatasi partisipasi, maupun hierarki formal yang mengatur siapa yang berhak hadir dan berbicara dalam forum. Keterbukaan semacam ini menjadi modal sosial penting bagi pelaku UMKM, yang pada umumnya berada dalam struktur ekonomi informal dengan keterbatasan akses terhadap ruang partisipasi formal lainnya.

Kesetaraan berbicara (*discursive equality*) mensyaratkan bahwa setiap peserta forum memiliki peluang yang sama untuk menyampaikan pendapat, terlepas dari perbedaan skala usaha atau senioritas. Data wawancara tidak menunjukkan adanya indikasi dominasi kelompok tertentu atas kelompok lain dalam proses musyawarah. Meski demikian, peneliti mencatat bahwa kesetaraan yang tergambar dalam data ini lebih merupakan kesetaraan formal-normatif (semua boleh bicara) ketimbang kesetaraan substantif yang terverifikasi secara empiris, sebab data yang tersedia belum mencakup perspektif pedagang lain mengenai dinamika kekuasaan informal di dalam forum, seperti pengaruh senioritas atau relasi personal antaranggota.

Rasionalitas komunikatif merujuk pada proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada argumentasi bersama, bukan pada otoritas sepihak. Pernyataan informan bahwa keputusan-keputusan penting "pastinya hasil dari musyawarah bersama" menjadi bukti empiris bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam forum pedagang mengikuti logika deliberatif, bukan logika instruktif dari atas ke bawah. Hal ini sejalan dengan konsep tindakan komunikatif (*communicative action*) Habermas, yang menekankan bahwa validitas suatu keputusan kolektif idealnya lahir dari proses argumentasi terbuka antarwarga, bukan dari keputusan otoritatif yang dipaksakan.

Prinsip otonomi menuntut bahwa ruang publik harus bebas dari intervensi negara maupun kepentingan pasar, sehingga opini publik yang terbentuk benar-benar merupakan hasil deliberasi warga secara mandiri. Pada indikator inilah data menunjukkan adanya keterbatasan yang cukup signifikan. Informan menyatakan bahwa pemerintah "hanya membatasi dimana batas UMKM bisa berjualan karena kan tujuan taman ini bukan hanya untuk bersantai." Pernyataan ini menegaskan bahwa keputusan mengenai batas wilayah berjualan bukan sepenuhnya hasil musyawarah pedagang, melainkan ditentukan oleh otoritas negara berdasarkan fungsi ruang publik yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, otonomi forum pedagang bersifat parsial: musyawarah internal berjalan bebas untuk hal-hal teknis (penataan lapak, iuran), tetapi tunduk pada batasan struktural yang ditentukan otoritas eksternal untuk hal-hal yang menyangkut fungsi ruang secara keseluruhan.

Orientasi pada konsensus tampak jelas dari cara forum menyelesaikan persoalan bersama, seperti penataan lapak dan penentuan iuran, yang menurut informan selalu dihasilkan dari musyawarah. Prinsip ini menjadi salah satu unsur yang paling konsisten terpenuhi dalam data penelitian, sebab tidak ditemukan indikasi keputusan sepihak dari pihak mana pun (baik dari sesama pedagang maupun dari luar) dalam pengaturan aspek-aspek teknis pengelolaan lapak dagang.

Berdasarkan data wawancara yang diperoleh, perilaku sosial pelaku UMKM di lokasi penelitian menunjukkan pola interaksi yang mencerminkan karakteristik ruang publik ideal sebagaimana dikemukakan oleh Jurgen Habermas, meskipun tidak sepenuhnya utuh. Usaha yang dijalankan informan bermula dari proses sosial yang tidak direncanakan secara formal, sebagaimana diungkapkan bahwa ia mulai berjualan "berawal ketika saya sedang mengajak anak saya bermain kemudian saya melihat peluang usaha yang cukup menjanjikan." Peneliti melihat titik awal ini sebagai temuan yang menarik secara teoretis: ruang publik dalam konteks



UMKM ternyata tidak selalu lahir dari desain institusional atau perencanaan kebijakan, melainkan tumbuh secara organik dari praktik ruang sehari-hari (everyday space), di mana taman yang semula berfungsi rekreatif secara bertahap berubah menjadi ruang sosial-ekonomi yang produktif.

Jaringan komunikasi informan pun tidak terbatas pada relasi transaksional dengan pelanggan, tetapi meluas pada sesama pedagang dan sesekali pihak pemerintahan, sebagaimana disampaikan bahwa pihak yang rutin diajak bicara adalah "pelanggan dan teman pedagang saya, sesekali dengan pihak pemerintahan ketika saya merasa ada beberapa hal yang harus saya bicarakan." Menurut peneliti, pola interaksi berlapis ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM bukan aktor pasif dalam ruang publik, melainkan aktor yang secara sadar membangun komunikasi lintas pihak sebagai strategi adaptif untuk mempertahankan keberlangsungan usahanya di tengah keterbatasan ruang formal yang tersedia.

Pola interaksi tersebut kemudian terinstitusionalisasi dalam bentuk forum kolektif, yaitu grup pedagang yang secara rutin membahas "persoalan sampah dan juga fasilitas untuk berjualan." Bagi peneliti, keberadaan forum ini menjadi bukti konkret bagaimana keluhan atau kepentingan individual bertransformasi menjadi aspirasi kolektif — sebuah proses yang menjadi inti dari konsep ruang publik Habermas sebagai arena pembentukan opini bersama melalui tindakan komunikatif (communicative action). Yang menarik untuk dicermati, transformasi ini terjadi tanpa fasilitasi eksternal maupun struktur formal yang rumit; forum ini berjalan atas inisiatif horizontal pedagang sendiri, yang mengindikasikan adanya kesadaran kolektif (collective consciousness) akan pentingnya ruang musyawarah bagi keberlangsungan bersama.

Dilihat dari aspek aksesibilitas dan kesetaraan berbicara, forum ini menunjukkan karakteristik yang cukup demokratis, ditegaskan melalui pernyataan informan bahwa "semua boleh berbicara" tanpa ada pembatasan berdasarkan status atau skala usaha. Proses pengambilan keputusan atas persoalan bersama, seperti penataan lapak dan penentuan iuran, juga dilakukan melalui mekanisme musyawarah, sebagaimana dinyatakan bahwa keputusan tersebut "pasti hasil dari musyawarah bersama." Peneliti menilai bahwa temuan ini menegaskan adanya rasionalitas komunikatif serta orientasi pada konsensus, dua unsur penting yang menopang legitimasi ruang publik dalam pandangan Habermas — bahwa keputusan yang mengikat semestinya lahir dari proses argumentasi bersama, bukan dari otoritas tunggal maupun dominasi sepihak.

Meskipun demikian, ruang publik yang terbentuk dalam konteks ini belum sepenuhnya otonom dari intervensi kekuasaan eksternal. Hal ini tampak jelas dari peran pemerintah yang tetap menjadi otoritas penentu dalam pembatasan wilayah berjualan, sebagaimana diungkapkan bahwa pihak pemerintah "hanya membatasi dimana batas UMKM bisa berjualan karena kan tujuan taman ini bukan hanya untuk bersantai." Peneliti berpandangan bahwa pernyataan ini menyingkap adanya batas struktural yang tidak dapat dinegosiasikan sepenuhnya melalui musyawarah internal pedagang, sebab fungsi ruang (taman sebagai ruang rekreasi publik) telah ditetapkan sebelumnya oleh otoritas negara sebagai bagian dari kebijakan tata ruang kota.

Dalam kerangka berpikir Habermas, kondisi ini dapat dibaca sebagai bentuk intervensi sistem (negara) terhadap dunia kehidupan (lifeworld) masyarakat, yang oleh Habermas sendiri disebut sebagai gejala kolonisasi dunia kehidupan (colonization of the lifeworld) — di mana logika administratif negara membatasi ruang gerak deliberasi murni yang idealnya lahir sepenuhnya dari kesepakatan warga. Peneliti berargumen bahwa meskipun pembatasan ini secara praktis bertujuan menjaga fungsi ruang publik secara keseluruhan (agar taman tetap dapat diakses untuk rekreasi), keberadaannya tetap menjadi indikator bahwa deliberasi pelaku UMKM belum sepenuhnya bebas dari dominasi kekuasaan struktural, sebagaimana disyaratkan dalam konsepsi ruang publik ideal Habermas.



Temuan ini juga membuka ruang diskusi lebih lanjut mengenai relasi antara ruang publik informal yang dibangun pelaku UMKM dengan ruang publik formal yang diatur negara. Alih-alih memandang keduanya sebagai relasi yang sepenuhnya bertentangan, peneliti melihat adanya pola akomodasi: pedagang menerima batasan struktural sebagai bagian dari kompromi yang wajar demi keberlangsungan fungsi taman secara keseluruhan, sementara di sisi lain mereka tetap mempertahankan otonomi penuh dalam mengelola persoalan internal kelompok melalui musyawarah. Pola akomodatif semacam ini dapat dipahami sebagai strategi adaptif kelompok marjinal-ekonomi dalam bernegosiasi dengan struktur kekuasaan yang lebih besar, tanpa harus kehilangan sepenuhnya ruang deliberasi kolektif mereka.

Dengan mempertimbangkan temuan-temuan tersebut secara keseluruhan, peneliti berkesimpulan bahwa perilaku sosial pelaku UMKM telah membentuk ruang publik yang secara internal cukup demokratis, egaliter, dan deliberatif — ditandai dengan keterbukaan akses, kesetaraan berbicara, dan orientasi pada konsensus melalui musyawarah. Namun demikian, ruang publik tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai ruang publik ideal secara utuh menurut Habermas, karena masih beroperasi dalam batas-batas yang ditentukan oleh otoritas negara. Oleh karena itu, peneliti memandang bahwa ruang publik yang terbentuk dalam kasus ini lebih tepat dikategorikan sebagai ruang publik parsial atau semi-otonom — sebuah bentuk ruang publik yang, meskipun belum sepenuhnya merepresentasikan ideal Habermas, tetap menunjukkan potensi besar bagi tumbuhnya kesadaran deliberatif di kalangan pelaku usaha mikro yang selama ini kerap dipandang berada di luar wacana partisipasi publik formal.

KESIMPULAN

Penelitian mengenai Perilaku Sosial Masyarakat dalam Memanfaatkan Taman Kota sebagai Ruang Publik (Studi Kasus Taman Kota Dealova Pangkalpinang) menunjukkan bahwa Taman Dealova memiliki fungsi yang multifungsi dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dianalisis menggunakan teori ruang publik Jürgen Habermas, diperoleh beberapa temuan utama.

1. **Bentuk perilaku sosial masyarakat** di Taman Dealova sangat beragam, mulai dari rekreasi bersama keluarga, berolahraga, bermain skateboard, berkumpul dengan teman, berfoto, berdialog, hingga menikmati dan membeli produk UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa taman tidak hanya berfungsi sebagai tempat rekreasi, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial yang dinamis dan plural.
2. **Perilaku sosial pelaku UMKM** berkembang dari pemanfaatan spontan terhadap peluang ekonomi di taman. Interaksi yang terbentuk meliputi hubungan dengan pelanggan, sesama pedagang, serta pemerintah atau petugas taman. Interaksi antarpedagang menjadi yang paling intens dan berkembang menjadi forum kolektif. Berdasarkan indikator ruang publik Habermas, aksesibilitas universal, rasionalitas komunikatif, dan orientasi konsensus terpenuhi secara kuat. Sementara itu, kesetaraan berbicara terpenuhi secara normatif, tetapi belum sepenuhnya terverifikasi secara substantif.
3. **Taman Dealova sebagai ruang publik inklusif** terlihat dari keterbukaannya bagi masyarakat tanpa membedakan status sosial, ekonomi, usia, maupun latar belakang pendidikan. Keberagaman pengunjung menunjukkan bahwa taman mampu menjadi ruang pertemuan masyarakat urban yang heterogen.
4. **Taman Dealova sebagai arena rasionalitas komunikatif** terlihat melalui berbagai interaksi dan dialog yang berlangsung secara bebas dan relatif egaliter. Interaksi antara pedagang, pelanggan, maupun sesama pengunjung dapat membangun pemahaman, relasi sosial, dan kohesi masyarakat.
5. **Taman Dealova sebagai ruang ekonomi informal** memberikan peluang penghidupan bagi pedagang dan pelaku UMKM melalui tingginya aktivitas pengunjung. Namun,



aktivitas ekonomi perlu dikelola dan ditata agar tidak mengurangi kenyamanan serta fungsi sosial taman.

6. **Dalam konteks masyarakat urban Pangkalpinang**, Taman Dealova berperan penting sebagai ruang terbuka yang mudah diakses dan relatif terjangkau, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap ruang privat maupun tempat rekreasi. Taman ini sekaligus menjadi ruang sosial, ekonomi, rekreasi, dan diskursif.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa Taman Dealova merupakan ruang publik yang multifungsi, inklusif, dan demokratis. Perilaku sosial masyarakat di dalamnya tidak hanya menciptakan interaksi sosial, tetapi juga membentuk ruang deliberatif, khususnya di kalangan pelaku UMKM. Meskipun demikian, deliberasi tersebut masih berada dalam batas-batas yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga menunjukkan adanya pengaruh struktur kekuasaan eksternal atau *kolonisasi dunia-kehidupan*. Dengan demikian, Taman Dealova memperlihatkan bahwa ruang publik dapat memperkuat interaksi sosial, kohesi masyarakat, dan praktik demokratis sekaligus menjadi bagian penting dalam pembangunan kota yang berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, saran ditujukan kepada pemerintah daerah, masyarakat, serta dunia akademik dan peneliti selanjutnya.

1. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah Kota Pangkalpinang perlu meningkatkan pengelolaan Taman Dealova melalui perbaikan dan penambahan fasilitas, menjaga kebersihan serta keamanan, dan memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Pemerintah juga perlu membuka ruang partisipasi masyarakat melalui forum musyawarah atau diskusi publik yang melibatkan masyarakat, komunitas, dan pedagang agar pengelolaan taman sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi pengguna.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan memanfaatkan Taman Dealova secara positif dan bertanggung jawab dengan menjaga kebersihan, fasilitas, serta menghormati pengguna lain. Taman juga perlu dimanfaatkan sebagai ruang untuk membangun solidaritas, memperluas relasi sosial, dan meningkatkan kebersamaan, bukan hanya sebagai tempat hiburan.

3. Bagi Dunia Akademik dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian dengan membandingkan Taman Dealova dengan ruang publik lain di Pangkalpinang maupun kota lainnya. Kajian juga dapat difokuskan pada kelompok tertentu, seperti remaja, perempuan, atau komunitas, serta mengkaji pengaruh teknologi dan media sosial terhadap pemanfaatan ruang publik.

Secara umum, pengelolaan Taman Dealova dan taman kota lainnya perlu diarahkan agar menjadi ruang publik yang inklusif, aman, dan berkelanjutan. Inklusivitas berarti taman dapat diakses seluruh masyarakat tanpa diskriminasi, keamanan menjamin kenyamanan pengguna, sedangkan keberlanjutan memastikan taman tetap dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang. Hal tersebut membutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan akademisi. Pemerintah berperan dalam penyediaan dan pengelolaan sarana, masyarakat sebagai pengguna sekaligus penjaga ruang publik, sedangkan akademisi memberikan kontribusi melalui penelitian dan rekomendasi kebijakan. Kolaborasi ketiganya dapat mewujudkan pengelolaan taman yang lebih partisipatif, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan bersama.



DAFTAR PUSTAKA

H. Khairuddin. (2008). Sosiologi Keluarga. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta

Max Weber. (2006). Tindakan Sosial dalam Masyarakat. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama

Soekanto, Soerjono. (2006). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, 21(1), 33-54.

Mukhtar, 2013. Metode Praktis penelitian Deskriptif Kualitatif. Jakarta: Gp Press Group.

Habermas, J. (1984). The theory of communicative action, Volume 1: Reason and the rationalization of society (T. McCarthy, Trans.). Beacon Press.